

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM OLEH SATUAN  
TUGAS PENGAWAS KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH (UMKM) KOTA PADANG**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Penulisan Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas  
Andalas*

OLEH :

**SITILADYNA AHMAD**

**BP: 1410111140**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**Pembimbing :**

**Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn**

**Titin Fatimah, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2018**

**PENGAWASAN TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM OLEH SATUAN TUGAS  
PENGAWASAN KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL  
MENENGAH (UMKM) KOTA PADANG**

(Siti Ladyna Ahmad, 1410111140, Fakultas Hukum, 2018, 66 halaman)

**ABSTRAK**

Dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Pasal tersebut berhubungan dengan koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Agar terciptanya koperasi yang sehat maka diperlukan pengawasan. Pengawasan dilakukan agar koperasi tetap berjalan berdasarkan peraturan yang mengatur. Namun fakta di lapangan masih ada koperasi yang menyimpang dari peraturan yang ada, dengan banyaknya koperasi yang tidak aktif dan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam di kota Padang. Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawas koperasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang, 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawas koperasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu untuk menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan terjun langsung ke lapangan. Dari hasil penelitian bahwa Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang belum maksimal dalam melakukan pengawasan, menunggu adanya laporan dari seksi kelembagaan dan seksi usaha koperasi terkait adanya suatu pelanggaran dalam suatu koperasi simpan pinjam. Masih ditemukan kendala yang menghambat terlaksananya pengawasan terhadap suatu koperasi simpan pinjam.

^Kata Kunci : Kewenangan, Pengawasan, Koperasi Simpan Pinjam

